



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI AGUSTIANI
2. Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
3. NHK : 478836

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.346.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 270 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 350 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 334 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/200 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.725.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
8. Tanah Seluas 328 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 429.000.000
9. Tanah Seluas 596 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 298.000.000
10. Tanah Seluas 530 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 98.500.000**



1. MOBIL, Toyota YARIS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, Honda Solo Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, Yamaha Solo Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 591.665.386

F. HARTA LAINNYA Rp. 130.000.000

Sub Total Rp. 6.187.665.386

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.187.665.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.